

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI AWAL MINGGU KEDUA JULI 2012

Minggu-minggu awal Juli 2012 Masa Persidangan IV tahun sidang 2011-2012, Dewan tetap fokus pada pelaksanaan fungsi bidang legislasi, anggaran dan pengawasan, dan kegiatan diplomasi parlemen. Berikut ringkasan kegiatan Dewan minggu ini.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

[1] Pada Rapat paripurna tanggal 3 Juli 2012, telah dilaksanakan Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi III dikemukakan antara lain; bahwa RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. RUU ini menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yang merupakan penyelesaian secara adil, yang meibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersma-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya. RUU ini menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Perkembangan dan proses pembahasan RUU ini memerlukan waktu yang cukup lama, dimulai dari Februari 2011 sampai 3 Juli 2012. Materi-materi krusial yang berhasil disepakati dan dirumuskan antara lain: batasan usia pertanggungjawaban anak (12-18 tahun) serta batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan (14-18 tahun). Kategori tindak pidana yang bisa didiversi dan tindak pidana yang tidak bisa didiversi yakni; tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun dapat didiversi, sedangkan yang ancamannya 7 tahun keatas tidak dapat didiversi. Diatur pula ketentuan, syarat, tatacara, dan jangka waktu penangkapan; dan syarat, tatacara, dan jangka waktu penahanan; jenis pemidanaan dan tindakan; kewajiban untuk tidak mempublikasikan perkara anak; dan lain-lain.

Didalam penjelasan umum RUU ini dikatakan bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak sebagaimana telah diratifi-

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali



kasi oleh Pemerintah RI No. 36 tahun 1990. Bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dna perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

RUU ini telah disetujui untuk disahkan menjadi UU oleh Rapat Paripurna DPR tanggal 3 Juli 2012.

[2] RUU Perlindungan Pekerja di Luar Negeri, atas inisiatif Komisi IX, telah diputuskan menjadi RUU Inisiatif DPR pada Rapur tanggal 5 Juli 2012. Pentahapan berikutnya akan diputuskan oleh Rapat Badan Musyawarah.

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

[1] Keterangan Pemerintah Mengenai UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2011, disampaikan pada Rapat paripurna tanggal 28 Juni 2012. Dalam keterangannya, Pimpinan mengatakan bahwa dalam memenuhi ketentuan konstitusional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, Pasal 30 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 38 UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2011, maka paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Pemerintah menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

[2] RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

telah diperiksa oleh BPK, dan BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atas LKPP Tahun 2011, masih sama dengan opini LKPP Tahun 2010, namun terdapat peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan menurunnya permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP Tahun 2011. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas LKPP.

[3] Berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 antara lain kondisi Perekonomian Indonesia tahun 2011 yang cukup menggembirakan, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup positif yaitu mencapai 6,5% atau sama dengan target dalam APBN-P TA 2011. Hal ini didorong oleh peningkatan investasi yang tumbuh 8,8%, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,7%, konsumsi pemerintah tumbuh 3,2%, ekspor tumbuh 13,6%, dan impor tumbuh 13,3%.

Laju inflasi tahun kalender yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks harga pada Januari-Desember 2011 sebesar 3,79% lebih rendah dari asumsi APBN-P TA 2011 sebesar 5,65%. Hal ini dikarenakan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika rata-rata mencapai Rp. 8.742/USD atau menguat 3,84% dibandingkan dengan rata-rata tahun 2010 sebesar Rp 9.078/USD. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dalam tahun 2011 rata-rata mencapai USD 111,5/barel lebih tinggi dari asumsi APBN-P TA 2011 sebesar USD95,0/barel sedangkan *lifting* minyak mentah Indonesia dalam tahun 2011 sebesar 898 ribu barel per hari, yang lebih rendah dari reali-

[2] **Pembahasan dalam Banggar perihal Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013.** Badan Anggaran telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 28 Juni 2012 dan 3 Juli 2012 dalam rangka penyelesaian akhir Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka Penyusunan RAPBN TA.2013.

Tema RKP Tahun 2013 yang telah disepakati yaitu “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Berdasarkan tema RKP 2013 serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, maka RKP 2013 ditekankan kepada penanganan isu-isu strategis yaitu (i) Peningkatan Daya Saing; (ii) Peningkatan Daya Tahan Ekonomi; (iii) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat; dan (iv) Pemantapan Stabilitas Sosial Politik.

Selanjutnya isu strategis tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Aksi sesuai dengan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Nasional Lainnya yang digariskan RPJMN 2010 – 2014, sebagai berikut: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Penanggulangan Kemiskinan, (5) Ketahanan Pangan, (6) Infrastruktur, (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik, (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi, (12) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (13) Bidang Perekonomian, dan (14) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Untuk kisaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBN 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro

NO.	Indikator	KEM & PPKF	Kesepakatan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,8 – 7,2	6,8 – 7,2
2.	Inflasi (%)	4,5 – 5,5	4,4 – 5,4
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	8.700 – 9.300	9.000 – 9.300
4.	Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	4,5 – 5,5	4,5 – 5,5
5.	Harga Minyak ICP (US\$/barel)	100 – 120	95 – 120
6.	Lifting Minyak (ribu barel/ hari)	910 – 940	890 – 930
7.	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak/hari)	1.290 – 1.360	1.325 – 1.390
8.	Lifting Minyak dan Gas Bumi (ribu barel/ hari)	2.200 – 2.300	2.215 – 2.320

Catatan: KEM & PPKF = Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

sasi tahun 2010 sebesar 954 ribu barel per hari.

[4] RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011 berupa LJKPP Tahun 2011 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disertai Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Lainnya. LKPP Tahun 2011 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Lampiran II-Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Aktual.

Selain itu Badan Anggaran dan Pemerintah juga telah menyepakati Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2013, yang meliputi: (1) Arah dan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat; (2) Kebijakan Belanja Pegawai; (3) Kebijakan Belanja Barang; (4) Kebijakan Belanja Modal; (5) Kebijakan Pembayaran Bunga Utang; (6) Kebijakan Subsidi Energi dan Non Energi; (7) Kebijakan Bantuan Sosial; (8) Kebijakan Belanja Lain-lain; serta (9) Kebijakan Belanja Kementerian/ Lembaga Negara.

Badan Anggaran dan Pemerintah juga telah menyepakati Kebijakan Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2013, yang me-

liputi antara lain: (1) Arah Kebijakan Transfer ke Daerah; (2) Kebijakan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; (3) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Hasil pembahasan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka Penyusunan RAPBN 2013 tersebut akan dilaporkan Badan Anggaran dalam Rapat Paripurna DPR RI yang direncanakan tanggal 5 Juli 2012.

Selain Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka Penyusunan RAPBN 2013, dalam Masa Sidang IV ini, Badan Anggaran juga akan melakukan pembahasan mengenai Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA.2012 dan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) TA. 2011 sebagaimana yang telah disampaikan Presiden RI kepada Ketua DPR RI melalui surat No. R-61/Pres/06/2012 tanggal 15 Juni 2012.

Pemerintah telah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2011 dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 28 Juni 2012. Tanggal 3 Juli 2012 Fraksi-Fraksi menyampaikan Pandangan Fraksi atas RUU P2APBN 2011 dalam Rapat Paripurna DPR RI. Selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Juli 2012, Pemerintah akan memberikan tanggapan atas Pandangan Fraksi atas RUU P2APBN 2011.

Selanjutnya Badan Anggaran dan Pemerintah akan melakukan Rapat Kerja untuk membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas RAPBN 2011 dan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA.2012 yang direncanakan pada tanggal 5 Juli 2012.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Pada tanggal 4 Juli ini, Tim Pengawas Century telah melakukan rapat dengan Menteri Keuangan, Bank Mutiara, LPS dan Forum Nasabah Bank Century dengan kesimpulan antara lain mendesak kepada lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan penyelesaian pembayaran masalah nasabah Bank Century oleh Bank Mutiara, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, dan meneruskan putusan-putusan pengadilan negeri yang terkait nasib nasabah Bank Century kepada BPK, KPK, dan pihak-pihak penegak hukum.

Masih dalam fungsi pengawasan, Alat Kelengkapan Dewan telah membentuk banyak Panitia Kerja, antara lain Panja mengenai Monitoring Pelaksanaan Pilkada 2012), Panja mengenai Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan, Panja mengenai Monitoring Pengelolaan Aset, Panja mengenai Konsorsium Asuransi, Panja mengenai Jamkesmas, Panja mengenai Pengelolaan Kawasan Hutan, Panja mengenai Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Panja mengenai Pupuk, Panja mengenai Gula, dan sebagainya.

Khusus mengenai Panja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan yang dibentuk Komisi II, diharapkan dapat melakukan kegiatan pengawasan yang lebih efektif, terutama dengan hadirnya Kepala BPN yang baru. Baik Panja, Komisi II maupun Dewan menyambut positif kehadirannya, dengan harapan bahwa pejabat baru ini dapat melakukan reformasi agraria. Permasalahan sengketa tanah dan konflik

pertanahan yang sangat krusial selama ini dan seringkali menimbulkan konflik pertanahan, harus segera diatasi. Manajemen pertanahan yang selama ini kurang transparan mudah-mudahan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.

KEGIATAN ANTAR-PARLEMEN

Ketua DPR dan Pimpinan BKSAP yaitu Sidarto Danusubroto dan Hayono Isman, melakukan kunjungan ke tiga negara ASEAN; di Malaysia bertemu dengan Ketua Dewan Rakyat HE. Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia dan Ketua Dewan Negara YB Tan Sri Abu Zahar Bin Datuk Nika Ujang; di Singapura dengan Ketua Parlemen Singapura HE. Michael Palmer dan PM Singapura Lee Hsien Long; dan di Myanmar dengan Presiden Myanmar U Thein Sein, Ketua Parlemen Pyithu Hluttaw (DPR Myanmar) HE. Mr. Thura U Shwe Mann, dan Ketua Amyotha Hluttaw (Senat Myanmar) Khin Aung Myint, pada tanggal 24-29 Juni 2012. Ketua DPR menyampaikan hal yang berkaitan dengan hubungan bilateral dengan masing-masing negara. Kunjungan ke tiga negara yang dikemas dalam *Working Visit of AIPA President*, khususnya untuk negara Malaysia, ditekankan perlunya meningkatkan hubungan baik demi terwujudnya stabilitas kawasan. Akhir-akhir ini memang, hubungan dengan Malaysia sedikit menghangat, namun hal tersebut tidak mengganggu hubungan kedua negara.

Dengan parlemen Malaysia, Ketua DPR mendorong pihak pemerintah Malaysia untuk mengimplementasikan secara tegas prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Protocol Amendment MoU on The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Worker 2006* yang telah ditandatangani pada tahun 2001. Ketua DPR menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya tenaga kerja Indonesia yang meninggal di Malaysia. Oleh karena itu perlu dukungan Parlemen Malaysia atas penyelesaian kasus-kasus Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia atas nama hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan Singapura, Ketua DPR menekankan komitmennya untuk meningkatkan program-program kerjasama di bidang hukum dengan mengajak Singapura untuk kembali membahas kerjasama ekstradisi kedua negara yang sempat terhenti pada tahun 2007. Parlemen Indonesia menilai, bahwa kerjasama ekstradisi ini sudah saatnya dibicarakan kembali agar kedua negara dapat segera memetik manfaat positif dari kesepakatan tersebut.

Dalam kunjungannya ke Myanmar, ketua DPR dan Pimpinan BKSAP menyampaikan komitmennya mendukung demokratisasi yang sedang berproses di Myanmar. Ketua DPR memuji semakin kondusifnya situasi Myanmar yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Myanmar. Pada kunjungan ke ketiga negara tersebut dan dalam pertemuan dengan ketua-ketua parlemen, Ketua DPR menyampaikan undangan untuk menghadiri pertemuan *AIPA Executive Committee Meeting* dan *The 9th Meeting of The AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat The Drugs Manace* yang akan diselenggarakan pada tanggal 8-12 Juli 2012 di Jogjakarta.*

Presiden AIPA Dukung Demokrasi di Myanmar

Ketua DPR RI Marzuki Alie mendukung proses pembangunan, reformasi sistem pemerintahan, dan demokratisasi di Myanmar.

“Sudah banyak kemajuan yang diraih oleh Myanmar, terutama dalam hal proses pembangunan, reformasi sistem pemerintahan, dan demokratisasi,” kata Ketua DPR Marzuki Alie saat melakukan kunjungan ke kota Nay Pyi Taw, bertemu dengan Presiden Myanmar U Thein Sein baru-baru ini.

Ketua DPR RI sebagai Presiden AIPA mengapresiasi perubahan-perubahan positif yang terjadi di Sistem pemerintahan Myanmar. “Masyarakat ASEAN akan terus mendukung transformasi politik yang damai di Myanmar. Indonesia yang telah mengalami proses reformasi politik juga memiliki komitmen untuk mendukung secara konkret demokratisasi di Myanmar,” kata Marzuki Alie

Marzuki Alie mengatakan, segenap masyarakat ASEAN, khususnya rakyat Indonesia sangat mengapresiasi langkah berani dari Presiden Myanmar U Thein Sein membebaskan 651 tahanan politik di Myanmar pada bulan Januari lalu. “Semoga komitmen Yang Mulia Presiden dapat segera diiringi dengan reformasi hukum yang memadai,” katanya.

Menurut Marzuki Alie, perubahan-perubahan di Myanmar akan memberikan hasil yang positif bagi kemajuan proses pembangunan Myanmar di masa yang akan datang, terutama dengan semakin terbukanya kesempatan Myanmar untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral.

Marzuki Alie juga mengucapkan selamat kepada segenap warga Myanmar atas keanggotaan penuh Parlemen Myanmar di AIPA. “Sebagai bagian dari satu keluarga besar, ASEAN dan AIPA, Myanmar dapat meningkatkan partisipasinya baik dalam organisasi tingkat regional maupun internasional, berdasarkan prinsip kerjasama



Presiden AIPA Marzuki Alie (tengah) berfoto bersama sesuai pertemuan dengan Presiden Myanmar U Thein Sein di istana kepresidenan Myanmar

dan perdamaian,”katanya.

Dia berharap pula agar Myanmar dapat turut menyukseskan Sidang Umum AIPA ke 33 yang akan diselenggarakan di Lombok, Indonesia pada bulan September mendatang. Kerjasama bilateral antara Myanmar dan Indonesia sudah berjalan baik selama lebih dari 60 tahun. Kedua negara juga memiliki beberapa kesamaan, yaitu masyarakat yang heterogen dari berbagai etnis, budaya, dan agama,”ujarnya.

Pada tahun 1997, lanjutnya, Indonesia adalah salah satu pihak utama yang mengupayakan keanggotaan Myanmar di ASEAN. Pemerintah dan Parlemen Indonesia juga terus berupaya untuk membuka celah bagi program-program kerjasama bilateral, baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan-keamanan.

Memandang kemajuan pesat dalam nilai total perdagangan Indonesia dan Myanmar, Marzuki Alie mewakili delegasi Indonesia meyakini bahwa dalam kerjasama bilateral, aktifitas perdagangan kedua negara akan terus meningkat, bukan hanya dari segi nilai

perdagangan, tetapi juga peningkatan variasi arus barang dan jasa. “Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan Myanmar sebagai partner dagang yang signifikan di kawasan, terutama dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Myanmar,”jelasnya.

Dengan ada Pertemuan antara Ketua DPR RI dan Presiden Myanmar tersebut, Marzuki Alie mengharapkan dapat terciptanya kesepahaman yang lebih baik antara Indonesia dan Myanmar. Stabilitas politik di Myanmar merupakan hal yang sangat penting di kawasan. “Baik Pemerintah maupun Parlemen Indonesia juga siap untuk mempererat kerjasama dengan Myanmar di berbagai bidang,”tegas Marzuki Alie.

Selain bertemu dengan Presiden Myanmar, Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Hayono Isman dan Sidarto Danusubroto, bertemu dengan Ketua Pyithu Hluttaw (DPR Myanmar) HE. Mr. Thura U Shwe Mann dan Ketua Amyotha Hluttaw (Senat Myanmar) Khin Aung Myint. (as) foto:as

Lawan Narkoba, Parlemen se-ASEAN Siapkan Jogja Action Plan

Parlemen negara-negara se-ASEAN atau Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) menyiapkan sebuah rencana aksi untuk melawan keganasan narkoba yang semakin hari semakin merajalela di kawasan Asia Tenggara.



Ketua BKSAP Surahman Hidayat



Wakil Ketua BKSAP Sidharto Danusubroto

laku parlemen. Oleh karenanya, draft resolusi yang diusulkan Indonesia juga harus memuat dengan tegas komitmen terhadap ketersediaan alokasi anggaran,"ujarnya.

Ketua BKSAP Surahman Hidayat mengatakan, Jogja Action Plan merupakan upaya pengejawantahan Indonesia dalam menindaklanjuti secara riil berbagai resolusi yang disepakati pada persidangan regional periode sebelumnya. "Indonesia mengambil inisiatif untuk menyiapkan rencana aksi dan technical working group kedua hal tersebut, dan juga bahwa rencana aksi penting sebagai landasan kerja nyata parlemen dalam melawan Narkoba,"ujarnya.

Sementara Wakil Ketua BKSAP Sidharto Danusubroto mengatakan, DPR akan menegaskan rencana Jogja Action Plan dalam melawan bahaya Narkoba, Indonesia sangat berkepentingan dalam isu tersebut mengingat bagi para pengedar narkoba, Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar. "Ini bahaya, Indonesia menjadi pasar, sementara pasokannya (supply) berasal dari berbagai negara,"ujarnya.

DPR RI dalam sidang AIFOCOM akan mengirimkan delegasinya yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua BKSAP Surahman Hidayat, Wakil Ketua BKSAP Sidharto Danusubroto, Wakil Ketua BKSAP Andi Anzhar Cakra Wijaya, Atte Sugandi, Evita Nursanty, dan Okky Asokawati. Sidang AIFOCOM diikuti sekitar 106 peserta dari parlemen 10 negara di Asean, dipimpin langsung oleh Ketua Parlemen, sementara dua negara (Singapura dan Thailand) dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemennya. (si)foto:wy/parle

Aksi tersebut meliputi sejumlah program yang dapat dilakukan parlemen seperti menjamin kenaikan anggaran untuk program rehabilitasi, sinkronisasi, berbagai macam reaktan dan prekursor hingga upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran publik akan bahaya narkoba.

Pembahasan detail mengenai rencana aksi tersebut akan dibahas dalam sidang the AIPA Fact Finding Committee to Combat The Drug Menace (AIFOCOM) yang akan digelar pada 8-12 Juli di Hotel Hyatt Regency Hotel, Yogyakarta, Indonesia.

Menurut Marzuki Alie, salah satu upaya untuk melawan bahaya narkoba di kawasan adalah dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk upaya-upaya melawan narkoba. "Ini juga menjadi bagian dari fungsi kita se-

Komisi IX DPR Minta Jamkesmas dievaluasi

Anggota DPR Endang Agustini Syarwan Hamid (F-PG) menyayangkan tidak adanya evaluasi Jamkesmas secara menyeluruh. Pasalnya, fungsi-fungsi pelayanan preventif dan promotif terhadap pelayanan Jamkesmas tidak terpantau dilapangan.

“Sekarang ini orang miskin selalu bertambah, sedangkan fungsi pelayanan seperti preventif dan promotifnya tidak terpantau,” ujarnya saat Raker Komisi IX DPR dengan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno, di Gedung Nusantara I, Senin, (2/7).

Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP) mempertanyakan batasan pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda. Karena kita ketahui, tidak semua orang menerima Jamkesmas dan terdaftar dalam program itu, tetapi ternyata sebagian ditanggung oleh Jamkesda. “Saya mempertanyakan batasannya yang kurang berjalan ini,” papar Rieke

Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pemerintah akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan dan keikutsertaan program Jamkesmas dan Jamkesda tersebut.

“Dalam upaya penyempurnaan program tersebut lalu jamkesmas ini menggunakan dana bantuan sosial.

Yang kemudian dikelola melalui mekanisme asuransi sosial dengan prinsip yaitu mengendalikan mutu sekaligus juga mengendalikan biaya dan ini yang sering menjadi pertanyaan mengapa dengan biaya yang relatif murah, tetapi bisa mencakup banyak masyarakat yang sampai saat ini berjumlah 76,4 juta orang,” ujarnya.

Ali Ghufon menambahkan, Jamkesmas bukan berarti tidak boleh laba seperti halnya investasi, tetapi dengan mekanisme hasilnya akan dikembalikan kepada peserta sesuai dengan visinya. “Para peserta non kartu ada sekitar 2.6 juta antara lain para penghuni rutan, panti sosial, gelandangan, orang terlantar dan para peserta yang menggunakan kartu adalah orang-orang miskin yang sudah terdaftar,” katanya.

Wakil Menteri Kesehatan menjelaskan, program Jamkesmas sendiri adalah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang miskin, hampir miskin, dan tidak mampu.

“Melalui askes kesehatan yang bermutu kepada masyarakat yang telah kami sebutkan tadi, prinsip pengadaan Jamkesmas ini sebetulnya hampir persis seperti di dalam sistem jaminan nasional atau asuransi kesehatan sosial yang pertama adalah dikelola secara nasional oleh kementerian kesehatan yang kedua mekanismenya mengikuti prinsip-prinsip asuransi dana sosial,” ujarnya. (si/rf) foto:wy



Anggota DPR Endang Agustini Syarwan Hamid



Suasana rapat kerja Komisi IX DPR dengan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Gedung Nusantara I DPR

Duta Besar Jerman Pamitan kepada Ketua DPR

Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Norbert Baas telah berhasil dalam menjalankan tugasnya menjembatani hubungan kedua negara.



Ketua DPR RI Marzuki Alie (kanan) menerima kunjungan kehormatan Dubes Republik Federal Jerman untuk Indonesia Norbert Baas (kiri) di Gedung Nusantara III DPR

Apresiasi ini disampaikan saat menerima kunjungan kehormatan Baas yang sekaligus pamitan mengakhiri masa tugasnya.

“Selama bertugas di Indonesia Yang Mulia telah berhasil menjembatani

hubungan baik parliamnt to parliamnt bahkan sampai tingkat people to people,” kata Marzuki dalam pertemuan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/12).

Ketua DPR yang saat ini men-

jabat Presiden AIPA juga menyebutkan Dubes Jerman sangat proaktif dan positif turut mendorong penandatanganan kerjasama Republik Federal Jerman dengan organisasi parlemen negara-negara anggota Asean tersebut.

Pertemuan formal itu menjadi cair ketika pembicaraan beralih pada kejuaraan sepakbola Piala Eropa yang baru saja berakhir. “Saya sebenarnya pendukung tim Jerman, tapi sayang sekali ya tidak berhasil sampai ke babak final,” ujar Marzuki.

Dalam penjelasannya, Dubes Jerman menyatakan sangat menikmati pekerjaannya di Indonesia, Ia diantaranya berhasil membangun kerjasama dibidang seni budaya dengan mendukung pameran lukisan Raden Saleh di Jakarta, serta konser arrenger kondang Indonesia, Adie MS di Berlin.

“Saya masih punya satu tugas penting lagi menyelesaikan kunjungan kenegaraan Kanselir Jerman ke Indonesia yang dijadwalkan tanggal 10-11 Juli yang akan datang,”pungkasnya. (iky) foto:iw



Ketua DPR RI Marzuki Alie (tengah) didampingi Anggota DPR Atte Sugandi (kanan) dari Fraksi Demokrat menerima kunjungan kehormatan Dubes Republik Federal Jerman untuk Indonesia Norbert Baas (kiri) di Gedung Nusantara III DPR

Baleg Sampaikan Usulan Perubahan Prolegnas

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan 4 (empat) usulan penambahan RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012 yang sebelumnya belum masuk dalam daftar Prolegnas.



Ketua Baleg Ignatius Mulyono saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM

Penyusunan di Baleg 8 (delapan) RUU.

Adapun 22 RUU yang disiapkan oleh Pemerintah berdasarkan inventarisasi Badan Legislasi adalah, telah disahkan menjadi UU satu RUU dan 8 (delapan) RUU Kumulatif Terbuka, masuk dalam Pembicaraan Tingkat I sebanyak 11 RUU (1 RUU belum masuk Prolegnas RUU Tahun 2012) dan proses penyusunan 11 RUU.

Dari data tersebut, kata Mulyono, perkembangan pencapaian Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 adalah telah disahkan menjadi UU 11 RUU, Pembicaraan Tingkat I sebanyak 28 RUU dan Proses Penyusunan di DPR dan Pemerintah 34 RUU.

Mulyono menambahkan, dari gambaran capaian legislasi tersebut tentu-

Rancangan Undang-Undang tersebut adalah RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional yang merupakan usulan dari Komisi X DPR, RUU tentang Kesehatan Jiwa usulan dari Komisi IX DPR dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat usulan dari beberapa Anggota Baleg.

Ketua Baleg Ignatius Mulyono menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Selasa (3/7) di gedung DPR.

Selain membicarakan evaluasi penanganan RUU Tahun 2012, rapat sore itu juga meminta pandangan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012.

Terhadap evaluasi penanganan RUU, Mulyono menyampaikan, dari 64 RUU Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 ada 42 RUU yang disiapkan oleh DPR dan 22 RUU disiapkan oleh Pemerintah.

Dari 42 RUU yang disiapkan oleh DPR, RUU yang telah disahkan menjadi UU sebanyak 2 (dua) RUU, Pembicaraan



Suasana rapat kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM

an Tingkat I 17 RUU dan 19 RUU DOB. Sampai pada Pengambilan Keputusan di Paripurna 1 (satu) RUU, Proses Penyusunan di Komisi 14 RUU dan Proses

nya masih sangat rendah dari Program yang sudah ditetapkan sebanyak 64 RUU.

Terkait dengan capaian tersebut,

katanya, tentunya harus dicarikan upaya-upaya agar program yang sudah ditetapkan bersama dapat dicapai pada akhir Tahun 2012 atau setidaknya dapat tercapai 50 persen dari program (32 RUU).

Pada kesempatan tersebut, Muliono juga menyampaikan klarifikasi kepada Pemerintah terkait pengajuan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang sudah disampaikan oleh Presiden ke DPR. Bahkan sudah dalam Pembicaraan Tingkat I namun RUU tersebut belum masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012. Terhadap hal tersebut, Baleg meminta tanggapan/pandangan dari Pemerintah.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, Indonesia

sangat memerlukan pengaturan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

RUU tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu upaya menindak terorisme, tidak hanya upaya menangkap teroris, tapi juga mencegah tindak terorisme.

Berdasarkan alasan tersebut, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dapat disetujui menjadi RUU Prolegnas Prioritas 2012.

Anggota Baleg dari Fraksi PKS, Mardani mengatakan, ke empat RUU yang diusulkan tersebut sangat layak dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2012. Menurutnya, UU Kebudayaan sangat penting karena negara kita tidak

punya proteksi kebudayaan.

Sementara Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga diperlukan dengan adanya dualisme advokat banyak sekali energi yang terserap untuk hal-hal yang tidak produktif.

Dalam kesempatan tersebut, Mardani juga menyampaikan perlunya kerjasama yang baik antara Pemerintah dan DPR dalam pembahasan setiap RUU. Sebab, katanya, kalau produk legislasi turun dan tidak mencapai target yang selalu disorot pasti DPR tidak Pemerintah.

Padahal, katanya, hambatan-hambatan itu datangnya bukan hanya dari DPR. Sebagai contoh RUU Pendidikan Kedokteran yang sudah final dibahas, namun tiba-tiba Pemerintah menarik mundur RUU tersebut. (tt) foto:wy

RUU SPPA Disetujui Paripurna DPR

Paripurna DPR menyetujui UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk disahkan menjadi UU.

“RUU tentang SPPA ini disampaikan oleh Presiden pada 16 Februari 2011 lalu, dan Pemerintah telah memerintahkan Menhuk HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menpan dan RB untuk mewakili presiden baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam pembahasan

dengan DPR,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin, saat membacakan Pandangannya terkait RUU SPPA dihadapan sidang Paripurna, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Anis Matta, di Gedung Nusantara II, Selasa, (3/7).

Menurut Azis, Komisi III DPR telah melakukan Rapat Kerja dan RDP secara maraton dengan Kementerian terkait

seperti Menhuk HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menpan dan RB. “Kemudian kita membentuk Panitia Kerja untuk perancangan tentang RUUSPPA, yang selanjutnya membahas materi yang ada dalam perancangan undang-undang tersebut,” katanya.

Pembahasan di tingkat Panja, selanjutnya, dimulai pada tanggal 3 Oktober 2011 kemudian dilakukan pembahasan secara intensif dengan Pemerintah terkait materi DIM didalam RUU tersebut.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengatakan, Pasal 24 ayat 2 dalam UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa sebuah kekuasaan kehakiman di atur oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. “Berdasarkan hal-hal yang telah disetujui, pemerintah telah memberikan apresiasi kepada anggota dewan yang terhormat terkait pembahasan RUU SPPA ini,” tambahnya. (rf/si)/foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin saat membacakan laporan RUU SPPA dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR

20 Juta Orang Miskin Terancam Terabaikan Jaminan kesehatannya

Masalah data kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) nampaknya akan terus berulang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Pemerintah diminta perlu mewaspadai ada sekitar 20 juta orang miskin yang tidak bisa berobat karena hak kepesertaan Jamkesmas mereka terabaikan alias tidak terdata.

“Saya menyesalkan cakupan kepesertaan Jamkesmas tahun 2012 masih dipatok 76,4 juta jiwa. Padahal berdasarkan hasil PPLS 2011 yang dirilis TNP2K dan BPS, jumlah keluarga kategori tidak mampu atau orang-orang miskin yang layak mendapatkan pelayanan Jamkesmas mencapai 96,7 juta jiwa,” ungkap Anggota Panja Jamkesmas Komisi IX DPR RI Herlini Amran di Gedung DPR, Selasa (03/07)

Lebih lanjut menurut legislator PKS ini, untuk kuota peserta Jamkesmas 2013 hanya akan ditingkatkan menjadi 86,4 juta jiwa. “Dalam rentang dua tahun kedepan 2012 sampai dengan 2013, akan ada sekitar 20 juta orang miskin yang jaminan kesehatannya berpotensi terabaikan negara,” tuturnya.

“Bayangkan siapa yang akan menanggung biaya kesehatan mereka bilamana sakit, sementara Jamkesmas tidak mengkavernya. Padahal anggaran terus naik dari tahun ke tahun,” katanya.

Pada tahun 2008 hingga 2010, secara berturut-turut, Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp 4,6 triliun pada 2008, Rp. 4,6 triliun pada tahun 2009, Rp 5,1 triliun pada tahun 2010, Rp 6,3 triliun pada tahun 2011. “Sedangkan pada tahun 2012 ini, terdapat penambahan anggaran untuk program Jamkesmas plus Jaminan Persalinan (Jampersal) sehingga nilai totalnya menjadi Rp 7,4 triliun” ujarnya.

Menurut Herlini, kasus-kasus pasien Jamkesmas ditolak Rumah Sakit masih terus bermunculan dan, yang kena getahnya DPR. “Berapa banyak lagi kami harus mengadvokasi orang miskin yang tengah merintih kesakitan karena hak layanan Jamkesmasnya diabaikan Pemerintah,”geramnya.

Herlini juga mengingatkan pemerintah untuk segera membuat cada-

ngan anggaran Jamkesmas guna mengantisipasi kasus-kasus penolakan orang miskin berobat ke rumah sakit yang mana jaminan kesehatannya sama sekali belum terdata.

“Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan program Jamkesmas ini. Salah satu indikator negara itu maju, dilihat dari kualitas kesehatan masyarakatnya. Saya berharap masalah orang miskin dilarang sakit tidak terjadi di Indonesia. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pendataan yang komperhensif guna menyong-



Wakil Ketua Komisi IX DPR Supriyatno



Anggota Panja Jamkesmas Komisi IX DPR Herlini Amran

song pelaksanaan BPJS Kesehatan, tanpa mewariskan permasalahan itu semua,” jelasnya.

Seperti diketahui banyak permasalahan ketidaktepatan data sasaran Jamkesmas di daerah-daerah pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan karena data sasaran Jamkesmas masih mengacu pada hasil survei tahun 2005 dan 2008.

Disamping itu bahwa pemerintah

pusat hanya menetapkan kuotanya saja sedangkan daerah yang menetapkan orang-orangnya yang didasarkan kriteria daerah masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran seperti data sasaran yang sudah tidak sesuai lagi, peserta yang sudah meninggal dunia, penduduk baru akibat kelahiran, perubahan tingkat sosial ekonomi dan lain-lain. (sc) foto: parle

DPR Setujui Pelaksanaan UU APBN 2011

Paripurna DPR menyetujui pertanggungjawaban UU APBN 2011, namun terdapat beberapa catatan dari beberapa Fraksi di DPR, diantaranya persoalan angka kemiskinan yang masih tinggi.



Juru Bicara Fraksi PKB, Chusnunia Chalim

perpajakan, jelas Nu'man, pengelolaan perpajakan masih krusial dan perlu didorong reformasi birokrasi perpajakan, dan persoalan di tingkat aparat perpajakan, dan wajib pajak.

Belanja negara, lanjutnya, pada desember 2011 mencapai 98,5 persen, ini menunjukkan masih belum optimalnya penyerapan anggaran karena itu kita harapkan penyerapan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian. "Rendahnya anggaran dan penyerapan terus berulang dimana rendah awal tahun menumpuk di akhir tahun. meski

ada yang tidak sesuai dengan APBNP. "seperti minyak mentah Indonesia 111 US dollar/barel atau lebih tinggi dari yang ditetapkan APBN 2011 sebesar 95 US dollar/barel, sementara lifting minyak 809 ribu barel perhari lebih rendah dari yang ditargetkan 900 ribu barel perhari," terangnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Rindhoko menyayangkan pembayaran bunga obligasi rekap yang mencapai Rp. 60 Triliun dimana seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat dengan membangun infrastruktur di berbagai daerah. "Tidak tercapainya target pengurangan kemiskinan diharuskan pemerintah menjalankan program progresif, kemudian mengurangi belanja rutin dan mengalihkan kepada dana infrastruktur, pertanian dan kesehatan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gerindra meminta pemerintah mengurangi pembahasan rutinitas APBNP dan melakukan penjadwalan ulang sehingga mengurangi belanja yang menumpuk di akhir tahun. "Perlu ditinjau ulang menutup defisit APBN dengan utang sehingga sekarang utang sudah mencapai Rp. 2000 Triliun," ujarnya.

Miryam S Haryani (F-Hanura) mendesak pemerintah memberikan sanksi terhadap lembaga yang tidak menerapkan akuntabilitas keuangan. "Minta pemerintah melakukan perbaikan kinerja Kemendikbud selama dua tahun berturut-turut mendapat disclaimer opinion dari BPK," ujarnya.

Markus Nari dari Partai Golkar menilai penurunan lifting minyak mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Oleh karena itu, perlu keseriusan pemerintah dalam pencapaian target lifting minyak dan pembenahan di lapangan. "Investasi di sektor hulu harus mendapatkan perhatian pemerintah," jelasnya. (si) foto:iw



Juru Bicara Fraksi PPP Nu'man Abdul Hakim saat menyerahkan hasil laporan pandangan fraksi mengenai UU APBN 2011 di Gedung Nusantara II DPR

“Terkait UU APBN 2011, PPP mencatat sejumlah persoalan, meskipun makro ekonomi berjalan dengan baik, namun ada yang harus dihadapi diantaranya persoalan kemiskinan yang masih tinggi,” ujar Juru bicara PPP Nu'man Abdul Hakim, di Gedung Nusantara I, Selasa, (3/7).

Menurutnya, PPP mencatat anggaran untuk kemiskinan terus meningkat namun angka kemiskinan juga tidak signifikan berkurang drastis. Terkait

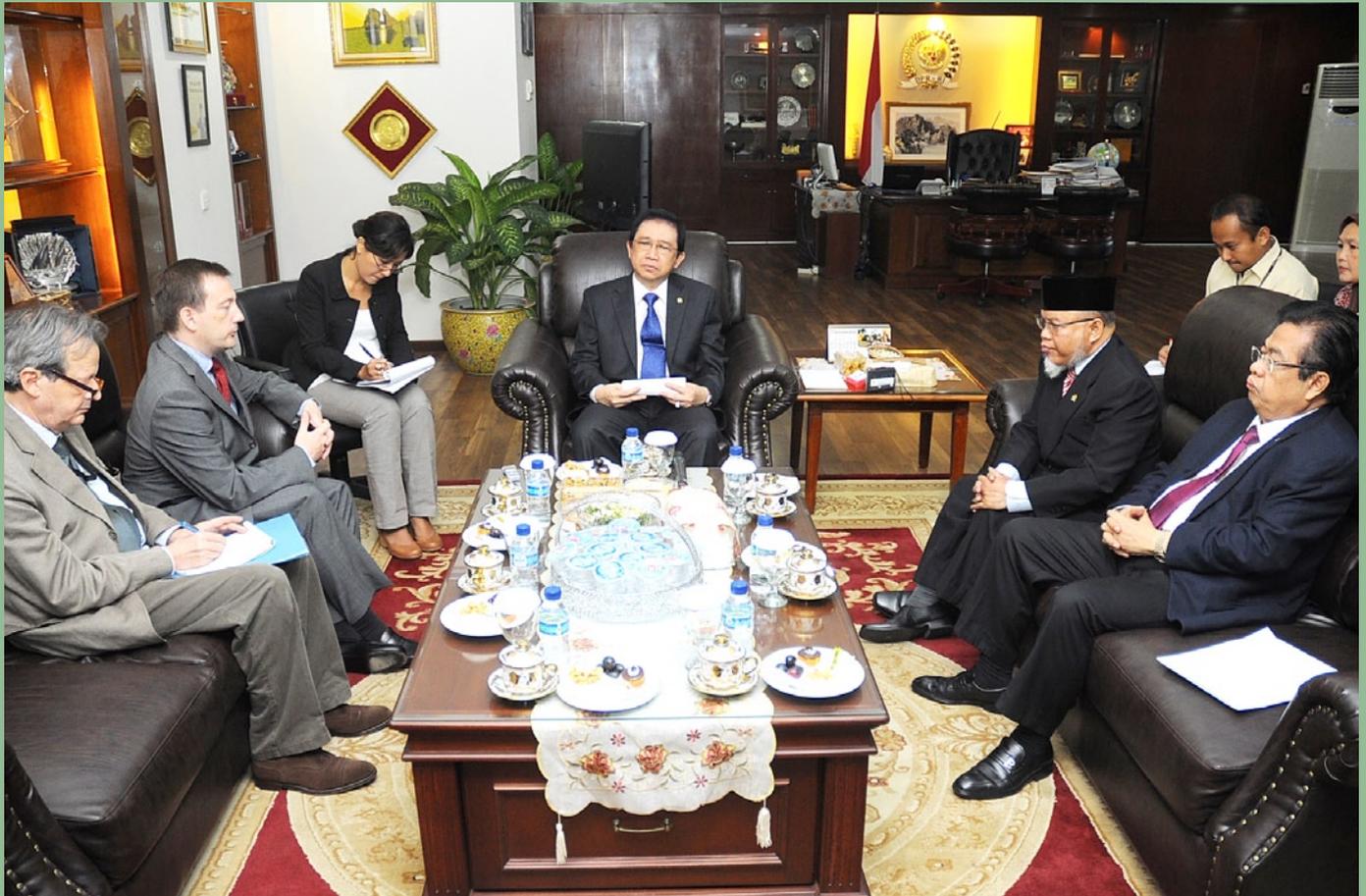
akhir tahun mencapai 98 persen ini terkesan kejar tayang,” ujarnya.

Dia menambahkan, perlu disusun revitalisasi pengawasan DPR terkait pengelolaan negara untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran keuangan negara.

Sementara Chusnunia Chalim (F-PKB) mengatakan, secara umum kondisi makro menunjukkan trend positif dan sesuai ekspektasinya. “artinya ada pencapaian kondisi makro. Namun,

DPR Dorong Kerjasama Ekonomi, Sosbud dan Pendidikan dengan Perancis

Ketua DPR Marzuki Alie mendorong kerjasama di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya serta pendidikan.



Ketua DPR Marzuki Alie (tengah) didampingi Ketua BKSAP Surahman Hidayat (kanan berpeci) menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Perancis Bertrand Lorlortholary di Gedung Nusantara III DPR

“Hubungan Indonesia dan Perancis sudah berjalan dengan baik dan hubungan yang terbangun diharapkan mendorong kerjasama yang lebih besar lagi khususnya bagi rakyat kedua negara,”ujarnya saat menerima Duta Besar Perancis Bertrand Lorlortholary, di Gedung Nusantara III, Selasa, (3/7).

Menurut Marzuki Alie, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang menjadi tujuan investasi negara-negara Eropa. Oleh karena itu, kita mengharapkan Perancis dapat memanfaatkan peluang tersebut sehingga dapat mendorong laju perekonomian kedua negara.

“Kita mengharapkan terciptanya kemitraan strategis dengan Perancis,

karena kita tahu, Indonesia punya pasar yang besar dan SDA yang luar biasa dan melalui bantuan teknologi yang maju kita harapkan dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi kedua negara,”ujarnya.

Marzuki mengatakan, DPR harus memainkan perannya dalam membangun komunikasi dan mengurangi hambatan antar kedua negara. “Terkait perijinan, DPR akan mendorong agar diberikan keleluasaan dan akses terkait persoalan perijinan,”terangnya.

Duta Besar Perancis Bertrand Lorlortholary mengatakan, Perancis berniat meningkatkan kerjasamanya pada berbagai bidang diantaranya pertahanan, ekonomi infrastruktur dan

teknologi seperti energi, transportasi air dan listrik.

“Selain itu, Perancis mendorong peningkatan Kerjasama kebudayaan seperti pertukaran pelajar Indonesia-Perancis, dimana saat ini terdapat 1000 pelajar Indonesia di Perancis dan kami ingin mendatangkan lebih banyak pelajar kesana,”ujarnya.

Menurutnya, Perancis sudah lama berinvestasi di Indonesia, seperti pada sektor energi, Perancis memiliki Perusahaan Total yang telah berinvestasi di Indonesia. “Hambatan selama ini yaitu persoalan administratif, karena itu kita berharap bisa mempercepat prosedur masuknya investasi di Indonesia,”paparnya. (si) foto:hd

Irgan Charil Mahfiz Jadi Ketua Pansus RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alkes, dan PKRT

Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Charil Mahfiz menjadi ketua Pansus RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat kesehatan, dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, (PSFAKPRT).

Pemilihan Ketua Pansus tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Koorkesra Taufik Kurniawan di ruang rapat komisi IX DPR Senayan, Jakarta, Rabu (4/7) siang.

Ketua Pansus terpilih Irgan Charil Mahfiz mengatakan, setelah terpilih di-rinya akan bekerja ikhlas dan kerja keras serta disiplin yang tinggi bagi semua anggota pansus. "RUU ini akan dibahas tidak terlalu lama, yaitu dengan tenggang waktu 6 bulan, Desember sudah selesai, karena waktunya sudah maksimal yang telah dilakukan di Badan legislasi," ujarnya.



Ketua Pansus terpilih Irgan Charil Mahfiz (tengah) memimpin rapat intern Pansus



Wakil Ketua DPR/Koorkesra Taufik Kurniawan (kiri) saat menyerahkan palu Pimpinan Pansus RUU PSFAKPRT kepada Irgan Charil Mahfiz

Sementara Wakil ketua DPR Bidang Koorkesra Taufik Kurniawan mengemukakan, masalah RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat kesehatan, dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga merupakan hak dasar manusia yang dijamin sepenuhnya oleh negara harus diselenggarakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Taufik, dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur pemerintah wajib melindungi masyarakat dari penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang merugikan dan atau membahayakan, melalui pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang memenuhi standar dan persyaratan.

Setiap warga negara memiliki hak asasi manusia atas kesehatan, hidup sejahtera lahir dan batin, seperti ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 28 h ayat 1 dan ayat 3. "Ini bertujuan mendapatkan sediaan farmasi yang sehat sesuai dengan kebutuhan, ini merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945," katanya.

Dia menambahkan, penyediaan fasilitas alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang baik dan berkualitas harus diwujudkan demi terjaminnya masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dari sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, serta setiap kegiatan dan upaya untuk memenuhi standar keamanan dan mutu bagi masyarakat dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan.

"Ketersediaan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berdaya saing tinggi sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional," ujarnya.(Spy)/foto:iw

Pemerintah Harus Sediakan Sarana dan Prasarana Buat ADK dan ABK

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, perlu disusun strategi terkait persoalan Anak dengan Kecacatan (ADK) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Diantaranya membangun persepsi, kesadaran, perilaku yang baik dan mengembangkan pelayanan guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan mereka. “Baru 30 persen yang menikmati pendidikan selain di Sekolah umum seperti kelas inklusif namun upaya penyekolahan anak seharusnya tidak hanya pada orang tua. Tetapi, masyarakat pun bisa berperan,”ujarnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK), Jakarta, Senin, (2/7).

Menurut Marzuki, ABK meskipun memiliki kekurangan ternyata mereka memiliki kemampuan atau bakat tertentu, karena itu perlu diberikan perhatian lebih dan tidak boleh dianggap generasi yang hilang dan tidak berguna dianggap beban.

Dia menambahkan, sekolah untuk ABK dan ADK sangat mahal karena itu pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarananya, serta orang tua jangan menganggap ini sebagai aib dan pemerintah wajib memenuhi fasilitas ADK dan ABK tersebut.

Melihat berbagai persoalan ADK dan ABK, lanjutnya, faktor orang tua sangat dominan selain lingkungan dan pemerintah. Selain itu Forum seperti ini harus kita dorong sebagai tempat mencari informasi mengenai kebutuhan ADK dan ABK. “Bahkan seringkali ditemui kesulitan orangtua untuk mencari informasi, berobat,” paparnya. Karena itu, forum ini diharapkan mampu memberikan informasi dalam mendeteksi serta berkordinasi dan konsultasi terkait persoalan ADK dan ABK ini.

Pada tahun 2004, BPS mencatat anak ABK dan ADK sebanyak 364 ribu orang. Hal ini, meskipun secara kuantitatif kecil tetapi dari sisi persoalan sangat kompleks. Bahkan, seringkali berada di masyarakat miskin. “Pelayanan pendidikan minim, kesehatan



Ketua DPR Marzuki Alie saat meresmikan website FKKADK di Pusdiklat Kemensos Jakarta

seringkita jumpai tidak hanya keluarga yang tidak punya keluarga mampupun sering memiliki kendala. Keterampilan orang tua dan stigma negatif masyarakat terhadap persoalan ini masih besar,”jelasnya. Pada kesempatan itu,

Ketua DPR Marzuki Alie juga meresmikan website resmi FKKADK, guna meningkatkan komunikasi dan sarana informasi bagi para orang tua yang memiliki ADK dan ABK. (si)foto: wy/parle



Ketua DPR Marzuki Alie saat membuka Rapat Kerja Nasional FKKADK di Pusdiklat Kemensos Jakarta

Serap Aspirasi Soal Pemda, Tim Pansus Pemda Kunker ke Jerman dan Jepang

Guna menyerap aspirasi dan perbandingan sistem pemerintahan lokal di beberapa negara, Pansus Pemerintah Daerah akan melakukan Kunjungan Kerja ke Jerman dan Jepang pada tanggal 2-8 September mendatang.



Pimpinan Pansus RUU Pemerintahan Daerah Totok Daryanto



Suasana rapat Pansus RUU Pemerintahan Daerah dengan Menteri Dalam Negeri

“Kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan studi perbandingan terhadap sistem pemerintahan lokal di negara tujuan. Selain itu, dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait upaya penataan kewenangan pemerintahan daerah di setiap tingkatannya. Sehingga, melalui kunjungan ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi proses pembahasan RUU tentang pemda tersebut,” ujar Ketua Pansus RUU Pemda Totok Daryanto, dalam siaran persnya kepada

Parlemen, Rabu, (4/7).

Menurut Totok Daryanto, Tim Pansus akan melakukan pertemuan dengan Ministry of the Interior, Perdana Menteri Negara Bagian (Ministerpräsident), Parlemen Negara Bagian (Bundesrat), Mayor (Bürgermeister), Parlemen Lokal (Rat, Council), Kepala Eksekutif di Negara Bagian Gemeindevorsteher di Jerman.

Sementara saat Kunjungan kerja ke Jepang, Tim Pansus akan bertemu dengan Ministry of State, Diet/Par-

lemen Jepang, Local Autonomy Agency, Regional Government (Ken/rural prefectures, Fu/Urban Prefectures, Do/Hokkaido) termasuk bertemu dengan gubernur dari Prefectures atau Walikota, To/Metropolis of Tokyo dan Auxiliary Local Bodies.

Terkait kunjungan ke Jerman, Tim akan melihat bagaimana pemerintahan lokal di negara setempat dalam menyelenggarakan otonomi oleh Kommune yang dijamin oleh Pasal 20 Grundgesetz (GG atau Konstitusi) Republik Federal Jerman, sebagai negara yang menganut paham demokratis, sosialis, dan federalis yang berbentuk Republik.

Dia menambahkan, sasaran kegiatan yang ingin dicapai melalui data dan informasi yang diperoleh dari kunjungan kerja ini yaitu untuk memperbaiki masukan dan sekaligus perbandingan bagi proses pembahasan RUU tentang Pemda, terutama menyangkut usaha memperkuat efektivitas hubungan antara pusat dan daerah di satu sisi, sekaligus di sisi lain mentransformasikan berbagai pengelolaan di tingkat lokal yang tidak saling berbenturan.

“Melalui sasaran semacam itu, diharapkan dapat menjadi alternatif bagi perkembangan demokratisasi pemerintahan daerah dan sekaligus secara riil meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah melalui bingkai NKRI,” tambahnya.

Totok mengharapkan, kunjungan kedua negara Jepang dan Jerman bertujuan menyempurnakan rumusan RUU tentang pemerintahan Daerah untuk perbaikan system penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tim Pansus Kunker ke Jerman dan Jepang akan melakukan Kunjungan pada tanggal 2-8 September 2012. (rf/ko/si) foto:wy

Panja Minerba Tekankan Pembagian CSR yang Adil

Panja Minerba menekankan pembagian manfaat Program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar tambang. Pasalnya, seringkali masyarakat sekitar kurang mendapatkan perhatian dari Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan.

“Jangan sampai pabrik bagus, masyarakat kanan kiri hanya kebagian debunya saja,” Kata Alimin Abdullah (F-PAN) setelah melihat jalan sekitar pabrik yang belum diaspal.

Menurutnya, pemerintah dan Pengusaha harus mengukur perimbangan antara uang yang disetor ke pemerintah dan kerusakan lingkungan yang tak tak terelakkan “Tidak gampang merklamasikan yang sudah rusak seperti itu, coba dihitung perhektar berapa biaya reklamasi itu,” ujarnya saat Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Kamis, (28/6).

Pada pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Sejumlah anggota Panja Minerba menanyakan mengenai transparansi pembagian hasil kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. “Kalau memang ke pusat 3% maka tiga persen dari apa? Harus tahu, setor ke daerah sekian, setor ke pusat sekian” jelas Alimin.

Dia menambahkan, transparansi harus benar-benar diterapkan sehingga dapat dihitung dan diukur menjadi data yang tepat dan dipertanggungjawabkan. “Karena nanti daerah juga teriak, masa kita tidak boleh tahu berapa hasil daerah kita sendiri. Itu tidak semestinya” tegasnya

Ketua Tim Kunlap Panja Komisi VII DPR Hasfiani mengatakan, tujuan melakukan Kunjungan ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan khususnya untuk UU no.4 tahun 2009, maka kita secara langsung melihat lahan dan pengolahan pertambangan di Bangka Belitung. “Kita ingin melihat pengolahan tambang dan dampaknya bagi masyarakat sekitar,” Kata Hasfiani se usai meninjau PT Refined Bangka Tin (RBT) di Sungaiiliat baru-baru ini. (ry) foto:ry/parle



Tim Panja Minerba DPR meninjau PT Refined Bangka Tin di Bangka Belitung



Tim Panja Minerba DPR melihat laboratorium PT Refined Bangka Tin di Bangka Belitung

Panja Minerba Akan Cari Solusi Terbaik Tumpang Tindih Otoritas Dua Kementerian

Panitia Kerja (Panja) Mineral dan Batubara Komisi VII DPR RI akan mencari solusi terbaik terhadap keluhan yang disampaikan PT. Smelting masalah tumpang tindih otoritas Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral dengan Kementerian Perindustrian.



Foto bersama Tim Kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI PT. Smelting, Gresik, Jawa Timur

Panja Minerba akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Perindustrian untuk menanyakan lebih jauh terkait dengan tumpang tindihnya peraturan yang ada di dua kementerian tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana saat mengadakan kunjungan lapangan ke PT. Smelting, Gresik, Jawa Timur, Kamis (28/6).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur PT. Smelting Makoto Miki menyampaikan hambatan yang dihadapi PT. Smelting terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral.

Dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dikeluarkannya Permen No. 7 Tahun 2012, menurut Miki, terjadi tumpang tindih otoritas

antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Perindustrian.

Sekarang ini, kata Miki, kontrol dari industri ini berada di bawah Kementerian Perindustrian, sementara UU No. 4/2009 pertambangan berada dibawah Kementerian ESDM.

PT. Smelting selain produksi utamanya tembaga juga mengembangkan industri-industri hilir untuk mengembangkan lebih lanjut industri yang ada di Indonesia.

“Jika kami berada dibawah Kementerian ESDM akan sulit membina industri-industri hilir,” katanya.

Miki menambahkan, kapasitas produksi yang dihasilkan dari industri ini adalah sebesar 300.000 ton per tahun. Karena proses peleburannya menggunakan proses kontinu mitsubishi, maka prosesnya dengan biaya rendah dan ramah lingkungan.

Teknologi ramah lingkungan yang digunakan PT Smelting membuat pe-

rusahaan ini menerima penghargaan bergengsi, penghargaan proper peringkat hijau selama beberapa tahun terakhir. Penghargaan ini diberikan pemerintah Indonesia terhadap pabrik yang andal, bersih dan ramah lingkungan.

Penghargaan ini, katanya, memotivasi PT. Smelting untuk terus menjadi “Pabrik peleburan yang terus berkembang dan ramah lingkungan.

Menanggapi keluhan Direksi PT. Smelting tersebut, Sutan berjanji akan mencari jalan tengah untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain Menteri ESDM, Panja Minerba berencana akan mengundang Menteri Perindustrian.

Nantinya akan dibuat suatu rekomendasi agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga produksi PT Smelting tetap berjalan dengan baik, benefitnya banyak untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. (tt) foto:parle

Masyarakat Minang Perjuangkan Status Nagari dalam RUU Desa

Pansus RUU Desa menerima aspirasi para petinggi adat Minang yang tergabung dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Mereka memperjuangkan status Nagari yang merupakan wilayah administratif terendah pada sistem pemerintahan di provinsi Sumatera Barat.

“Nagari tidak sama dengan desa, Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, punya struktur pemerintahan secara adat,” kata Ketua LKAAM, Sayuti Datuk Rajo Pangulu dalam RDPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/12).

Dalam Nagari, tambahnya terdapat wilayah ulayat yang disebut pusaka tinggi milik komunal yang dipegang oleh penguasa ulayat yang terdiri dari penghulu suku, mamak kepala waris dan mamak dalam kaum. Apabila struktur adat ini tidak mendapat ruang dalam tatanan hukum, tanah ulayat ini dapat berubah menjadi HGU, HGB, Hak Pakai bahkan Hak Milik Pribadi yang dapat bermuara pada konflik horizontal.

“Mengacu pada kondisi keistime-

waan yang ada di Sumatera Barat kami mengusulkan RUU Desa diganti namanya menjadi RUU Pemerintahan Terendah/Terdepan,” ungkapnya. Usulan ini menurutnya juga sudah disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

Ketua Bundo Kanduang, organisasi perempuan di Minangkabau Puti Reno Raudah Taib memaparkan, pemerintahan Nagari sudah berkembang jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Disini juga berlangsung tatanan demokrasi yang lebih tua dari pada di Eropa.

“Kita juga menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan posisi kedudukan dan peranan perempuan setara dengan laki-laki. Sehingga kesetaraan gender bagi orang minang sudah selesai,” lanjut guru besar perguruan tinggi di Sumbar ini,”ujarnya.

Dia berharap Pansus RUU Desa dapat memberikan perhatian pada keistimewaan Minangkabau, apalagi Nagari memiliki luas wilayah setara dengan 9 Desa di Pulau Jawa.

Ketua Pansus RUU Desa, Ahmad Muqowam mengatakan akan memperhatikan masukan yang disampaikan masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. “Keluhuran adat harus dapat solusi dalam UU ini, pembahasannya harus mengacu pada kebhinekaan bangsa Indonesia.” tekannya.

Ia menjelaskan RUU Desa yang merupakan produk legislasi usulan pemerintah sejauh ini baru memasuki tahapan menerima masukan dari publik. Proses pembahasan termasuk penetapan nama RUU dijadwalkan dimulai pada masa persidangan yang akan datang. (iky)foto:wy/parle



Ketua LKAAM, Sayuti Datuk Rajo Pangulu memberikan masukan RUU tentang Desa di Gedung DPR RI



Ketua DPR RI Marzuki Alie (tengah) membubuhkan tandatangan di sarung tinju dalam acara pembukaan Kejurnas Tinju Amatir Yuniior ke-XVI di Jakarta Timur, Senin (02/07) foto:wy



Ketua DPR Marzuki Alie meresmikan website FKKADK, di Pusdiklat Kementerian Sosial Jakarta. Senin (02/07) foto:wy



Tim Spesifik Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Utut Adianto mengunjungi Keraton Solo, Jawa Tengah. Kamis (28/06) foto:nt



Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR meninjau perpustakaan di Bali, Kamis (28/06) foto:spy



Tim Kunker Spesifik Komisi VII yang dipimpin Soekarnotomo melakukan peninjauan ke lokasi limbah PT Chevron Pasifik Indonesia, Riau, Jumat (15/06) foto:si



Kunjungan Spesifik Panja Minerba meninjau pabrik biji timah di PT RBT Bangka Belitung, yang dipimpin Asfihani, Kamis (28/06) foto:ry

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**
Layanan Informasi Publik di **www.ppid.dpr.go.id**